

3.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Ya	Program Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi harus berwawasan lingkungan. Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program- program Dinas PU CK seperti Program pembangunan Sarana prasarana Sanitasi di kabupaten Gunung Mas; Program Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air limbah; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Namun sayang, Bupati terpilih tidak secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pengelolaan sanitasi pada uraian visi misinya, padahal faktanya saat ini Kabupaten Gunung Mas adalah Kabupaten yang masyarakatnya masih melakukan budaya buang air bersih sembarangan (di atas 70%) dikarenakan tidak tersedianya MCK yang baik terutama di daerah pedesaan. Padahal sanitasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan hidup. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.
4.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan	Ya	Program-Program Pembangunan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program- program Distamben seperti kegiatan Pengadaan PLTS, Pengadaan PLTMH, Pengembangan Energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang energi dan migas yang memfokuskan pada penyediaan tenaga listrik, yang dilakukan melalui pembangunan pembangkit dan jaringannya. Dengan cara memanfaatkan sumber energy yang ada seperti batubara, sumber energy terbarukan, seperti tenaga air, tenaga surya, panas bumi, dan lain-lain. Bahkan Bupati terpilih menghendaki 5 (lima) tahun kedepan yang harus tetap diperjuangkan adalah pembangunan SPBU sebanyak 3-4 buah dalam rangka menstabilkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok di wilayah kabupaten Gunung Mas. Hal ini tentu harus dicermati oleh Distamben sebagai leading sector penyediaan energy, yang seyogianya dimasukkan jelas dalam program Renstra nya.
5.	Pembinaan, Pengendalian Pengembangan Pertambangan	Ya	Program-Program Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program- program Distamben seperti Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang berpotensi merusak Lingkungan; Program Pembinaan dan Peayanan Perizinan Pertambangan; Program Pembinaan dan Pengawasan peaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang pada usaha pertambangan.

		<p>Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang pertambangan untuk mengelola potensi sumberdaya alam baik itu tambang batu bara maupun emas, namun tetap fokus pada penyelamatan lingkungan dengan prinsip serasi, seimbang dan lestari, melalui tidak memberikan kebebasan semaunya terhadap ruang wilayah dalam melakukan aktivitas penambangan.</p> <p>Pembangunan di bidang ini bagaikan dua keping mata uang yang saling berlawanan, dampak positif dan negatifnya hampir sama besarnya. Di satu sisi sangat besar kontribusinya terhadap PAD, tetapi di sisi lain sangat buruk kontribusinya bagi lingkungan ekologi. Ketiawaian Pemkab dalam mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan. Pemkab harus mencari solusi win-win solution agar kegiatan ini berjalan baik tanpa konflik. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat baik bagi citra Pemkab di mata daerah lain dan sangat besar kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Kalimantan tengah menjadi lumbung energi.</p>
--	--	---

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Gunung Mas 2014-2019 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2014

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B.	M.

6.1.3 Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2014-2019

Pokja PL melakukan integrasi hasil KLHS ke dalam Rancangan RPJMD melalui kebijakan, rencana, dan/atau program masing-masing PD terkait Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB). Integrasi hasil KLHS dilakukan dengan cara merangkum Kebijakan/Rencana/Program (KRP) disandingkan dengan Kajian pengaruh, Alternatif KRP, dan Rekomendasi yang disarankan untuk dilaksanakan atau menjadi pertimbangan bagi PD terkait Isu PB.

Integrasi hasil KLHS ke dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut.

KABAG HUKUM	KASURBAG
b	h

Tabel 6.4.
Pengintegrasian Hasil KLHS dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2014-2019

Kebijakan, Rencana, Program sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas					RangkumanKajian Pengaruh	Alterntif KRP (Usulan KRP)	Rekomendasi	Instansi terkait KRP
1	2				3	4	5	6
No	KRP			Lokasi				
1.	Mningkatkan Pemberdayaan dan Daya Saing Ekonomi Rakyat	Pengembang an usaha tani menetap dan berkelanjutan	- Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kabupaten Gunung Mas	Usaha peningkatan produksi hasil pertanian, khususnya perluasan kebun Sawit yang notabene nya sering menggu nakan bahan kimia terbukti telah menimbulkan peneemaran, merusak ekosistem, dikhawatirkan akan mencemari sumber- sumber air bersih, baik dari sungai maupun tanah.	a. Meminimalisir penggunaan bahan kimia b. melaksanakan tindakan konservasi tanah dan air c. memperhatikan keseimbangan ekosistem d.menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan	Pembangunan di bidang Pertanian (secara umum), hendaknya mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus mem berikan porsi yang besar pada konsep usaha berbasis masyarakat	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			- Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Kabupaten Gunung Mas	Usaha peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah,	a. menjaga stabilitas produksi untuk jangka panjang dan berkelanjutan b. memperhatikan keseimbangan	Peningkatan Ketahanan Pangan dengan cara meneiptakan jaringan kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KABAG HUKUM

KASUBBAG

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>u</i>

					meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan.	ekosistem c. mampu menyediakan kebutuhan lokal, kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk ekspor. d. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat	sistem pertanian berwawasan lingkungan.	
			- Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Kabupaten Gunung Mas	Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar akan berdampak pada menurunnya populasi biota perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah	a. Pengelolaan lingkungan di industri perikanan harus terus ditingkatkan b. Melaksanakan Sosialisasi, pelatihan, pembinaan teknis dan jejaring (networking) antar industri perikanan, masyarakat, asosiasi dan	Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar seperti peternakan dan perikanan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep usaha berbasis masyarakat	- Dinas Perikanan

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

					lingkungan, dll.	perguruan tinggi c. Mendorong penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan d. Perlindungan anak ikan, yaitu larangan penangkapan ikan yang belum dewasa		
2.	Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional	Melaksanakan / Mempertahankan kinerja Pelayanan prasarana Jalan, Jembatan, dan Sanitasi	- Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Gunung Mas	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdampak baik untuk aksesibilitas manusia dan berdampak buruk pada meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik	a. Pembangunan/Peningkatan/pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar memperhatikan sumber-sumber air dan kawasan konservasi. b. Membangun/meningkatkan akses jalan menuju desa-desa di hulu	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar memprioritaskan ruas-ruas jalan utama (bab.V tabel rekomendasi). Selain Ruas –ruas utama, juga tidak kalah pentingnya untuk terus proaktif mengusulkan peningkatan jalan di sepanjang jalan Jalur/Ruas jalan	Dinas Pekerjaan Umum



						sungai Kahayan, hulu sungai Miri, hulu sungai Hamputung, hulu sungai Rungan dan hulu sungai Manuhing.	Takaras-Tbg.Talaken-Tbg.Jutuh-Tbg.Rahuyan-Tewah-Kuala Kurun , karena kondisinya belum fungsional secara keseluruhan yang berstatus jalan nasional	
			- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kabupaten GunungMas	Perecepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman akan berpengaruh positif pada meningkatnya kualitas lingkungan, dan kebiasaan hidup bersih masyarakat.	a. Diversion atau pemisahan: urine dan tinja dikumpulkan secara terpisah dalam kakus yang berdesain khusus b. Containment atau penampungan : urine dan tinja disimpan atau diperam secara terpisah sampai aman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi hendaknya memperhatikan prinsip Sanitasi berwawasan lingkungan dapat menghemat air, melindungi sumberdaya air, meneegah polusi dan mengembalikan nutrien ke dalam siklus makanan.	- Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Kesehatan - RSUD

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	H

						<p>untuk digunakan atau didaur ulang</p> <p>c. <i>Sanitization</i> atau penyuci hamaan</p> <p>d. <i>Recycling</i> atau daur ulang</p>		
3.	Mningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat	Mningkatkan pemanfaatan energy baru terbarukan sebagai energy alternatif	- Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan	Kabupaten Gunung Mas	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan akan berpengaruh pada Meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya popuasi biota darat dan perairan.	<p>a. Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang baru dan terbaharukan</p> <p>b. Meningkatkan Sistem Panas Bumi (<i>Enhanced Geothermal Systems/ EGS</i>)</p> <p>c. Menggunakan teknologi Nanosolar (Energi listrik tenaga surya)</p> <p>d. Mcncegah dan Mengendalikan Emisi CO2</p>	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan hendaknya harus berwawasan lingkungan. Dengan cara memanfaatkan sumber energy yang ada seperti batubara, sumber energy terbarukan, seperti tenaga air, tenaga surya, panas bumi, dan lain-lain dengan memperhatikan potensi dan daerah kawasan konservasi.	Bidang Perekonomian Pada Setda Kabupaten Gunung Mas



						(Carbon Capture & Storage/ CCS) e. Mengembangkan Tenaga Nuklir f. Mengembangkan Jaringan Cerdas (Smart Grids)		
4.	Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari	Mengoptimalkan Sumber daya mineral dan Batubara	- Pembinaan, Pengendalian Pengembangan Pertambangan	Kabupaten Gunung Mas	Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Berubahnya bentang alam, menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca	a. Pengelola pertambangan perlu ditegaskan kembali kewajibannya dalam melaksanakan rehabilitasi/ reklamasi b. Pengelola Pertambangan agar berkonsultasi dahulu dengan pemerintah daerah setempat, pemilik lahan atau instansi terkait	- Pembinaan, Pengendalian Pengembangan pertambangan hendaknya dapat mengelola potensi sumberdaya alam baik itu tambang batu bara maupun emas. - Agar pengelola/ pelaku pertambangan melaksanakan kewajibannya untuk rehabilitasi/ reklamasi lahan pasca tambang	Bidang Perekonomian Pada Setda Kabupaten Gunung Mas

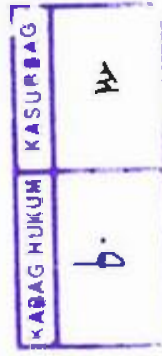
KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	H.

						lainnya c. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb).		
			- Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Kabupaten Gunung Mas		a. Agar lokasi Penambangan di kawasan hutan lindung dan cagar alam sedapat mungkin dihindari b. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer c. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari permukiman penduduk d. Lokasi	- Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat harus dilaksanakan secara rutin - Agar tetap fokus pada penyclamatan lingkungan dengan prinsip serasi, seimbang dan lestari, melalui tidak memberikan kebebasan semaunya terhadap ruang wilayah dalam melakukan aktivitas penambangan	Bidang Perekonomian Pada Setda Kabupaten Gunung Mas

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	M

[illegible]

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Gunung Mas 2014-2019 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2014



Tabel 6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab			
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung	
MISI 1: Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.															
1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.	1. Peningkatan dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan setiap jenis dan jenjang pendidikan di setiap kecamatan.	meningkatnya APK/APM disemua jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persen	APK PAUD 50%; APK SD/MI 99%; APK SMP/MTs 90%; APK SMA/SMK 75%	APK PAUD 57%; APK SD/MI 99%; APK SMP/MTs 90%; APK SMA/SMK 80%	APK PAUD 60%; APK SD/MI 99%; APK SMP/MTs 90%	APK PAUD 65%; APK SD/MI 99%; APK SMP/MTs 90%	APK PAUD 70%; APK SD/MI 100%; APK SMP/MTs 99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PPPA	
				2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga terampil.	bertambahnya USB SMK di Setiap Kecamatan	Unit	3 Unit	3 Unit							
				3. Peningkatan kualitas SDM Pendidik pada berbagai jenjang pendidikan.	Bertambahnya Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan	Persen	SD/MI 40%; SMP/MTs 85%; SMA/SMK 90%	SD/MI 50%; SMP/MTs 82%; SMA/SMK 92%	SD/MI 60%; SMP/MTs 90%	SD/MI 75%; SMP/MTs 95%	SD/MI 75%; SMP/MTs 95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Transnaker & KUKM	Dinas PPPA	
				4. Melaksanakan rotasi tenaga pendidik secara berkala.	terjadi promosi dan mutasi	Kali	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan KPPD	UPTD Dinas Pendidikan	
				5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan untuk penyediaan tenaga terampil.	meningkatnya fasilitas pendidikan	Rasio ketersediaan penduduk/usia sekolah SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK yang sesuai dengan SPM	SD/MI 1:22; SMP/MTs 1:27; SMA/SMK 1:36	SD/MI 1:22; SMP/MTs 1:27; SMA/SMK 1:36	SD/MI 1:22; SMP/MTs 1:27	SD/MI 1:22; SMP/MTs 1:27	SD/MI 1:22; SMP/MTs 1:27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan umum, Dinas PMD	UPTD Dinas Pendidikan	
				6. Peningkatan sarana bangunan pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru dan kepala sekolah, rumah guru, rumah penjaga sekolah, bangunan Sanitasi sekolah (WC guru dan Siswa) serta kelengkapan bangunan sekolah lainnya.	meningkatnya kualitas pendidikan yang sesuai dengan SPM	Persentase SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK yang sesuai dengan SPM	SD/MI 50%; SMP/MTs 45%; SMA/SMK 90%	SD/MI 60%; SMP/MTs 50%; SMA/SMK 100%	SD/MI 70%; SMP/MTs 60%	SD/MI 75%; SMP/MTs 70%	SD/MI 75%; SMP/MTs 70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan	Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan dan Kelurahan	
				7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan mengoptimalkan fungsi UPTD pendidikan yang ada di kecamatan	meningkatnya kunjungan pengawas TK/SD/SMP/SMA ke sekolah-sekolah	Persentase kunjungan ke sekolah	75%	80%	90%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan	Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan dan Kelurahan	
		2. Meningkatnya	2. Meningkatkan Upaya	1. Meningkatkan sarana dan	Bertambahnya Alkes	Persentase;	Alkes 65%;	Alkes 75%;	Alkes 80%;	Alkes 85%;	Alkes 87%; Tenaga	Dinas Kesehatan	RSUD; Dinas	PKK; Dharma	

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	11

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja dan Nakes	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penangungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
		dorajat kesehatan masyarakat	kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	prasarana kesehatan yaitu bangunan kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Pustu dan alat kesehatan	dan Nakes	orang	Tenaga Kesehatan 497/persatuan penduduk	Tenaga Kesehatan 507/persatuan penduduk	Tenaga Kesehatan 517/persatuan penduduk	Tenaga Kesehatan 527/persatuan penduduk	Kesehatan 530/persatuan penduduk	PPKB	PPKB	PKK, Dharma Wanita
				2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan	Persentase peningkatan pendidikan tenaga kesehatan	Persentase	75%	85%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Badan KPPD	
				3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil,	Meningkatnya kunjungan Nakes ke warga, tercurupnya obat dan kualifikasi Nakes	Persentase kunjungan Tenaga Kesehatan	75%	80%	85%	90%	100%	Dinas Kesehatan; Puskesmas	RSUD, Dinas PPKB	PKK, Dharma Wanita
				4. Memperluas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu	Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang menggunakan sarana kesehatan	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	35%	40%	45%	50%	55%	Dinas Kesehatan; Puskesmas	RSUD, Dinas PPKB	PKK, Dharma Wanita
				5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap bahaya Narkoba, obat-obatan terlarang dan serta penyakit HIV/AIDS melalui penyuluhan dan kerjasama dengan lembaga atau komisi yang berwenang, dengan instansi teknis atau SKPD di lingkup Kabupaten Gunung Mas	Menurunnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan perilaku yang diharapkan melalui kegiatan penyuluhan	Persentase perubahan perilaku yang diharapkan melalui kegiatan penyuluhan	65%	75%	85%	95%	95%	Dinas Kesehatan; Puskesmas	RSUD, Dinas PPKB	PKK, Dharma Wanita
				6. Keanggotaan JKN, BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh penduduk Kab. Gunung Mas	Meningkatnya keanggotaan JKN, BPJS	Persentase anggota BPJS	70%	80%	90%	95%	99%	Dinas Kesehatan, RSUD Puskesmas	BPJS	Dinas Transnaker & KUKM
MISI 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.														
2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera.	1. Meningkatkan Ketahanan Pangan	1. Mendorong aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan UMKM.	1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan UMKM.	Bertambahnya	produktivitas	Pada Sawah	Pada Sawah 34;	Pada Sawah	Pada Sawah 46,84;	Pada Sawah 47,2;	Dinas Perindag; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan; Dinas Transnaker & KUKM	Dinas PMD	Dinas Pekerjaan Umum

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Nitro Utama	Pendukung
				pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku UMKM	produksi olahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan UMKM	stok pangan (hwintal/ton /ha) dan populasi ternak (ekor)	33,83; Padi Ladang 23,84, Jagung 23,5; kerbau 130, sapi 3.860, babi 24.320, ayam ras 68.450, ayam pedaging 65.750	Padi Ladang 22,48, Jagung 24,68; kerbau 150, sapi 4.060, babi 26.210, ayam ras 69.750, ayam pedaging 70.120	45,66; Padi Ladang 24, Jagung 25,66; kerbau 165, sapi 4.310, babi 27.250, ayam ras 70.820, ayam pedaging 72.540	Padi Ladang 25,5, Jagung 26,56; kerbau 180, sapi 4.560, babi 28.430, ayam ras 72.640, ayam pedaging 74.250	Padi Ladang 27,22, Jagung 27,36; kerbau 200, sapi 4.722, babi 29.550, ayam ras 73.650, ayam pedaging 75.310	Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan	Pekerjaan Umum	& KUKM
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang berbasis produk pertanian, perikanan, perkebunan dan UMKM.	1. meningkatkan intermediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian, perikanan dan perkebunan serta UMKM	Bertambahnya pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan dan UMKM yang bermitra dengan Bank	Jumlah pelaku Usaha	5 Jumlah pelaku usaha	5 Jumlah pelaku usaha	10 Jumlah pelaku usaha	13 Jumlah pelaku usaha	17 Jumlah pelaku usaha	20 Jumlah pelaku usaha	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan	Dinas PMD; Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Transnaker & KUKM; Perbankan
			2. Meningkatkan akses pasar hasil pengolahan pertanian dan perikanan	Adanya pasar ikan, buah, sayur	Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perikanan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
			3. Revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar daerah	Bertambahnya jenis komoditi, meningkatnya kualitas sarana pasar.	Persen	40%	60%	70%	80%	85%	85%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perikanan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1. Peningkatan kapasitas pelaku kelompok tani dan perkebunan, perikanan, peternakan serta UMKM dalam pengolahan dan pemasaran	1. Peningkatan akses permodalan bagi budi daya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM	Bertambahnya kreditor Bank di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan UMKM	Persen	35%	85%	55%	55%	55%	70%	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan	Dinas Transnaker & KUKM	Perbankan; Dinas Kehutanan & Pertanahan
			2. Pendidikan dan pelatihan manajemen pengolahan dan pemasaran.	Meningkatnya kualitas hasil olahan, kualitas informasi produk dan pasar.	Persen	20%	30%	40%	50%	55%	55%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Dinas Kehutanan & Pertanahan
			3. Mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap hasil produk UMKM	Adanya peraturan tentang perlindungan UMKM	Jumlah Perda	0	1	0	1	1	2	Dinas Transnaker & KUKM	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Koperasi
	4. Meningkatnya PDRB sub sektor perikanan	1. Memperluas areal dan intensifikasi komoditi pertanian dan perkebunan	1. Penetapan areal-areal usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan	adanya Perbup tentang penetapan area usaha pertanian, perikanan dan perkebunan	Jumlah Perbup	0	1	0	1	1	2	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Dinas Transnaker & KUKM	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kehutanan dan Pertanahan
			2. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan produksi pertanian dalam artian luas	Meningkatnya hasil produksi pertanian	Jumlah produksi (Ton)	Padi Sawah 2.757 ton; Padi Ladang 6.807 ton, Jagung 62 ton	Padi Sawah 3.128 ton; Padi Ladang 12.353 ton, Jagung 64 ton	Padi Sawah 4.976 ton; Padi Ladang 11.790 ton, Jagung 66 ton	Padi Sawah 5.152 ton; Padi Ladang 12.676 ton, Jagung 70 ton	Padi Sawah 5.225 ton; Padi Ladang 13.356 ton, Jagung 73 ton		Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Dinas Transnaker & KUKM	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kehutanan dan Pertanahan
			3. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai jenis komoditi.	Adanya Peraturan bupati tentang alih fungsi lahan	Jumlah Peraturan	0	1 Buah	0	1 Buah	2 Buah	2 Buah	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan; Dinas Kehutanan & Pertanahan	Kantor Badan Pertanahan Gunung Mas	Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan

KABAG HUKUM KASIJUBAG

h

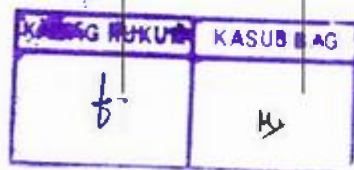
h

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
		5. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	1. Penguatan kelembagaan seni dan budaya	1. Mengembangkan event-event seni budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kalij)	Kali	1 Kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
		6. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Peningkatan budaya lokal dan keanekaragaman budaya wisata	1. Meningkatkan dan melestarikan objek wisata serta benda seni budaya lokal	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
		7. Meningkatnya sektor industri	1. Peningkatan promosi kesenian dan budaya lokal	1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	
		8. Meningkatnya sektor perdagangan	1. Memperluas ruang pelibatan organisasi pemuda dalam pembangunan	1. Menifasilitasi organisasi kepemudaan	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	
			1. Memperbanyak even even pertandingan dan perlombaan olahraga	1. Memfasilitasi keikutsertaan atlet-atlet daerah dalam even-even olahraga	Jumlah Gedung (Unit)	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
				2. Membentuk Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) untuk semua cabang olahraga	Jumlah Pusat Pendidikan	Buah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
MISI 3: Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.														
3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dasar	1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur	1. Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik (kualitas dan kapasitasnya)	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan.	Bertambahnya panjang jalan, peningkatan status badan jalan,	Km;Persen	737,935 Km; 18,008 Persen jalan kondisi baik	737,935 Km; 20,940 Persen jalan kondisi baik	737,935 Km; 23,537 Persen jalan kondisi baik	737,935 Km; 26,362 Persen jalan kondisi baik	737,935 Km; 28,708 Persen jalan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan	Bappeda
				2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana jalan	Semakin terpelihara kualitas jalan	Persen	18,008 Persen jalan kondisi baik	20,940 Persen jalan kondisi baik	23,537 Persen jalan kondisi baik	26,362 Persen jalan kondisi baik	28,708 Persen jalan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan	Bappeda
		1. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air	1. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat	Rasio jaringan irigasi	Persen	48%	54%	59%	62%	65%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan & Perikanan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
				2. Meningkatkan cakupan layanan irigasi teknis terhadap luasan area pertanian	Bertambahnya lahan pertanian yang terairi	Persen	12,50%	35,50%	42,50%	47,50%	55,00%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perikanan; Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan & Perikanan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
	2. Meningkatnya Infrastruktur jalan ke desa	1. Meningkatnya konektivitas	1. Membuka akses melalui jalan darat ke desa-desa untuk	1. Pembuatan jalan-jalan darat baru ke desa-desa tertinggal untuk mendorong pusat pertumbuhan	Persenjasa jalan desa yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten	Persen	45%	55%	65%	70%	75%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
			mendorong pertumbuhan ekonomi.	ekonomi baru.										
				2. optimalisasi kerjasama pembanguana antar desa dan antar kecamatan.	adanya regulasi kerjasama antar desa	Jumlah perdes (Buah)	0	1	1	1	1	DinasPMD	Sekretariat Daerah	Bappeda
	3. Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi	2. Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi	1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat sesuai dengan standar kesehatan yang layak	1. Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang masih belum memenuhi standar kesehatan	Persentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan	Persen	45%	55%	65%	75%	85%	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial	Bappeda; Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah
	4. Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi	1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas	1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan perumahan dan pemukiman yang ada dengan peningkatan akses infrastruktur	1. Pembangunan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung keamanan dan kenyamanan di lingkungan perumahan dan pemukiman sehingga layak dan nyaman.	Persentase Aksesibilitas dan kenyamanan perumahan dan pemukiman	Persen	45%	55%	65%	75%	65%	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial	Bappeda; Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah
		1. Meningkatkan sektor pariwisata												
MISI 4: Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan.														
4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan.	1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN.	1. Meningkatkan pelaksanaan RB	1. Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.	terwujudnya aparatur negara yang taat/sadar hukum	Persen	60%	70%	80%	90%	95%	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah	
					tersusunnya rumusan kebijakan disiplin ASN pemerintah daerah kabupaten gunung mas	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Badan XPPD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekretariat Daerah
				2. Optimalisasi manajemen kepegawaian	tersedianya laporan tentang kinerja kepegawaian	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan KPPD	Semua Perangkat Daerah	
				3. Menyusun regulasi yang bisa mengubah perilaku dan budaya	tersusunnya laporan LAKIP yang akuntabel	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah	



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PDPenanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Meningkatkan penataan reformasi birokrasi di semua lini dan sektor	1. Membuat Road Map Reformasi sebagai tatatan dan pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government)	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah	
		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	1. Optimalisasi organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan	1. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah, dengan memperhatikan keahlian gender.	jumlah PERDA dan produk hukum kabupaten Gunung Mas	Produk hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah	
			2. Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel	1. Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Terukurinya tingkat Kinerja aparatur (Tapkin) pemerintah Kabupaten Gunung Mas	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah	
		4. Meningkatnya kapabilitas APIP	1. Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai	1. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai di semua jenjang pemerintahan khususnya di kecamatan dan kelurahan.	Adanya aplikasi berbasis internet untuk Website Kab. Gunung Mas	Aplikasi Website	1 Aplikasi Website	1 Aplikasi Website	1 Aplikasi Website	1 Aplikasi Website	1 Aplikasi Website	Sekretariat Daerah	Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas	Kecamatan dan Kelurahan
		5. Meningkatnya maturitas SPIP	1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya Realisasi sumber PAD daerah	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	Badan PKAD, Bappeda	Semua Perangkat Daerah
				2. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi	2. Adanya informasi pendapatan daerah di website	jumlah WEB	1	1	1	1	1	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	Badan PKAD, Bappeda	Semua Perangkat Daerah
				3. Penetapan Alokasi anggaran yang jelas untuk mengakomodir perencanaan Bottom Up dan Top Down melalui Pagu Indikatif Kecamatan/Desa (PIK/D) atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIKK) diatur lebih lanjut dalam Perda/Perbup	2. Pengelolaa akses masyarakat dalam mendapatkan informasi anggaran daerah	ada/tidak ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	Badan PKAD, Bappeda	Semua Perangkat Daerah
					3. Penetapan Alokasi anggaran yang jelas untuk mengakomodir perencanaan Bottom Up dan Top Down melalui Pagu Indikatif Kecamatan/Desa (PIK/D) atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIKK) diatur lebih lanjut dalam Perda/Perbup	Ditetapkan Perda/Perbup/SK Bup tentang perencanaan dan Penganggaran	1 Buah Perda dan 1 Buah Perbup	1 Buah SK Bup	1 Buah SK Bup	1 Buah SK Bup	1 Buah SK Bup	Bappeda, Badan PKAD	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
	6. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan		1. Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik	Terbangunnya Jumlah badan Publik PPD	Buah	78 Buah	10 Buah	12 Buah	15 Buah	20 Buah	Dinas KISP	Sekretariat Daerah	PT. Telkom
				2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bag seluruh pelayanan publik	Jumlah Website di SKPD pemberi layanan publik	Unit SKPD	18 SKPD	23 SKPD	28 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	Dinas KISP	Sekretariat Daerah	PT. Telkom
				3. Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan	adanya database terpadu tentang kependudukan	ada/tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil	Sekretariat Daerah
				4. Menyusun Grand Design pengendalian penduduk	adanya database terpadu tentang Grand Design Pengendalian kependudukan	ada/tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil	Sekretariat Daerah
				5. Pembuatan dan penyusunan Buku Monografi	adanya Buku Monografi	ada/tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil	Sekretariat Daerah
				6. Melakukan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga	Terlaksananya pendataan keluarga	Kali	0	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil	Sekretariat Daerah
				7. Penyusunan Policy Brief dan strategi pengendalian kependudukan	Tersusunnya Policy Brief dan strategi pengendalian kependudukan	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil	Sekretariat Daerah
	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif berkeadilan gender	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif berkeadilan gender	Persentase usulan musrenbang dalam penganggaran	Persen	60%	80%	90%	90%	90%	Bappeda	Dinas PMD	Kecamatan dan Kelurahan
				2. Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan.	Menurunnya hasil temuan BPK	Persen	70%	80%	90%	95%	95%	Badan PKAD; Inspektorat	Bappeda	Semua Perangkat Daerah
	1. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang keluarga berencana		1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.	1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.	Cakupan Peserta KB Aktif; Jumlah sarana dan prasarana KB	orang/unit	18.400/4	20.240/6	22.264/8	24.490/10	26.939/12	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				2. Meningkatkan pemahaman keluarga dan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.	terselenggaranya penyuluhan terhadap keluarga & remaja mengenai kesehatan reproduksi	kali	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah



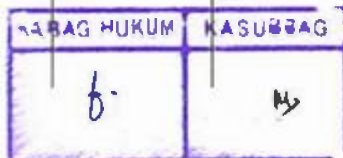
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
				3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi.	terselenggaranya advokasi dan KIE tentang KB & Kesehatan Reproduksi	kali	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				4. Menela dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten dan kecamatan.	terpadunya program kerja KB	program	2 Program	2 Program	2 Program	2 Program	2 Program	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
			2. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak	1. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak, remaja dan lansia.	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.	tersedianya database kependudukan	ada/tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Pendewasaan Usia perkawinan, bahaya HIV-AIDS, bahaya Napza dan Seks Bebas.	Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R	18	25	30	35	40	Dinas PPKB, Komisi AIDS	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				4. Menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan remaja dan mahasiswa.	terselenggaranya rakor/penyuluhan terhadap anak/remaja	Kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	Dinas PPKB, Komisi AIDS	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				5. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, melalui pembentukan, penumbuhan, dan pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	Terbentuknya tingkat ketahanan ekonomi keluarga (kelompok)	Kelompok	35 kelompok	45 kelompok	55 kelompok	60 kelompok	65 kelompok	Dinas PPKB	Dinas Dukcapil; Dinas Kesehatan; PKK; Dharma Wanita; GOW	Sekretariat Daerah
				6. Mengusahakan permodalan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	Bantuan stimulan bagi ibu-ibu PKK dalam Kebun Desa	ada/tidak ada dalam Dima Hibah	ada	ada	ada	ada	ada			

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	Ms

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
	2. Terselenggaranya tahapan kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrenbang yaitu mulai dari musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.	1. Tersusunnya dokumen RPJMD, RKPD dan RTD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.												
	3. Meningkatnya akses layanan dan perhatian administrasi pertanahan	1. Meningkatnya pengusulan penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah tepat waktu.												
		2. Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin.												
		3. Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> KABAG HUKUM KASUBBAG </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 6 14 </div> </div>														

MISI 5: Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	1. Menurunkan pencemaran lingkungan.	1. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia.	1. Mengembangkan potensi sumber-sumber energi terbarukan	Bertambahnya PLTS, Bio Diesel, mikro hidro (jumlah pengguna listrik)	Persen cakupan masyarakat menggunakan listrik	65,08%	72,35%						
			2. Menambah kemampuan pasokan energi listrik	1. Membangun sumber-sumber energi listrik baru	Bertambahnya PLTS, Bio Diesel/Etanol, mikro Hidro	Unit/jumlah	500 PLTS	500 PLTS; 1 PLTMH, 1 Bio Diesel/Etanol, 200 Kompor BioMassa						
				2. Meningkatkan kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO)	Bertambahnya Jumlah pelanggan PLN	Jumlah Pelanggan	10.638	11.702						
		2. Terpenuhiya baku mutu kualitas air, tanah dan udara.	1. Menambah kemampuan pasokan BBM	1. Meningkatkan pembangunan fasilitas distribusi BBM	Bertambahnya Jumlah SPBU	Unit	1 Unit	0	0	1 Unit	0	0	Pertamina	-
MISI 6 : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah														
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah	1. Meningkatkan tenaga kerja terampil	1. Meningkatkan peran pemudadalam pembangunan.	1. peningkatan kualitas tenaga pendidikan bagisekolah keterampilan.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan untuk penyediaan tenaga terampil.	Bertambahnya lembaga pelatihan keterampilan	Buah	1 Buah	2 Buah	3 Buah	4 Buah	5 Buah	Dinas Transnaker & KUKM, Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekretariat Daerah	-
				2. Fasilitasi penyaluran tenaga terampil ke dunia usaha.	tercukupinya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh investor	Persen	45%	55%	65%	85%	90%	Dinas Transnaker & KUKM, Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekretariat Daerah	-
			2. Akreditasi penyelenggara lembaga pendidikan	1. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.	Adanya MoU antara Pemda dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan	Jumlah MoU	0	0	1	0	1	Dinas Transnaker & KUKM, Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekretariat Daerah	-
		2. Meningkatnya prestasi olahraga.												
	2. Meningkatkan perempuan yang aktif pada pembangunan	1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.	1. Mengembangkan kerjasama dengan investor.	1. Fasilitasi kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak investor.	Adanya MoU antara Lembaga Pendidikan dengan investor	Jumlah MoU	0	0	1	0	1	Dinas Transnaker & KUKM, Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekretariat Daerah	-
			2. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	1. Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian iklim investasi.	Terbit regulasi tentang perjanjian daerah (Perda)	Jumlah Perda	0	0	1	0	1	Bappeda, Dinas PMPTSP	Sekretariat Daerah	-
				2. Mengembangkan kerjasama promosi daerah dengan dunia	Adanya Pameran Produk daerah	adanya keikutsertaa	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda, Dinas PMPTSP, Dinas	Sekretariat Daerah	-



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Mitra Utama	Pendukung
				usaha,		ndalam even promosi daerah						Perindag		
	3. Meningkatnya keamanan lingkungan.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat.												
	4. Meningkatnya jumlah investasi daerah.	1. Meningkatnya investasi												
		2. Meningkatnya jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terlayar												
		3. Meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2, S-3												
MISI 7: Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.														
7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.	1. Meningkatkan aksesibilitas lingkungan sesuai	1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar.	1. Peningkatan ketataan semua pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang.	1. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial.	Capaian Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	19,35%	20,44%	26,15%	27,17%	30,00%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan & Pertanahan
					Jumlah lokasi wisata alam	Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	Dinas Parpora, Dinas Kehutanan &	Sekretariat Daerah	-
					Jumlah fasilitas sarana pagelaran seni budaya.	Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	Dinas Parpora	Sekretariat Daerah	-
		1. Menyediakan air bersih bagi seluruh warga dan meningkatkan sanitasi dan meningkatkan layanan persampahan	1. Meningkatkan cakupan layanan melalui PDAM dan penyediaan sumur air permukaan	2. Meningkatkan pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang	Tertibnya penggunaan dan pemanfaatan ruang	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum; Bappeda	Dinas Kehutanan & Pertanahan, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Sekretariat Daerah
					Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air bersih	Jiwa	12.190 Jiwa	12.940 Jiwa	13.690 Jiwa	14.450 Jiwa	15.190 Jiwa	Dinas Pekerjaan Umum;	Kantor PDAM	-
				2. Meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan persampahan yang menjangkau permukaan warga.	Persentase penanganan sampah	Persen	78%	86%	90%	96%	96%	Dinas Pekerjaan Umum; DLH	Bappeda	Kecamatan dan Kelurahan
		1. Pemanfaatan SDA, lingkungan dan energi yang seimbang dan berkelanjutan	1. Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan		Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penyelesaian masalah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan & Pertanahan, Dinas Pertanian, Distan & Ketahanan Pangan	Sekretariat Daerah

KABAG. HUKUM	KASUBAG
h	h

Misi	Tujuan	Sa s aran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					PD Penanggungjawab		
							2015	2016	2017	2018	2019	Uta ma	Mitra Utama	Pendukung
					Pencemaran status muu air	Persen	-	-	33,30%	67,70%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan & Pertanahan, Dinas Pertanian, Distan & Ketahanan	Sekretariat Daerah
					Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Persen	51,90%	63,00%	89,00%	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan & pertanahan, Dinas Pertanian, Distan & Ketahanan Pangan	Sekretariat Daerah
					2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA	Meningkat produksi SDA	Persen	65%	69%	73%	75%	80%	Dinas Kehutanan & Pertanahan, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan	Bappeda
			1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana	Terbangunnya budaya sadar bencana	Jumlahkelompok budayasadar bencana	Kelompok	5Kelompok	6Kelompok	8Kelompok	10Kelompok	12 Kelompok	BPBD, Pokja Siaga Bencana, Polres, Polsek, TNI	Dinas Sosial	Kecamatan dan Kelurahan
			2. Meningkatkan ketanggap darurat bencana	Meningkatnya rapid respon	waktu kecepatan ke tempat bencana/jam	waktu kecepatan ke tempat bencana/ jam	6	4	3	2	1,5	BPBD, Pokja Siaga Bencana, Polres, Polsek, TNI	Dinas Sosial	Kecamatan dan Kelurahan
			3. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonsiliasi	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia	Persentase tingkat pemulihanpasca bencana non manusia	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD, Pokja Siaga Bencana, Polres, Polsek, TNI	Dinas Sosial	Kecamatan dan Kelurahan
		2. Terjaganya Pelestarian Taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru untuk Suaka Flora dan Fauna di Kabupaten Gunung Mas.	Tertata dan terjaganya kelestarian kawasan Tahura Lapak Jaru.											

KABAG HUKUM	KASUBAG
B.	H.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang meliputi efisien, efektif, ekonomis dan taat pada aturan perundangan yang berlaku.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

a. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2014 - 2019 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Namun demikian diharapkan pada tahun tahun kedepan proporsi belanja pegawai terhadap total APBD akan turun secara bertahap. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bantuan sosial.

Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	br

kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dengan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dalam bantuan permodalan, juga berimplikasi pada meningkatnya belanja tidak langsung dalam lima tahun kedepan.

Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk:

- a) Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan;
- b) Pemberian insentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c) Pemberian penghargaan atas capaian kinerja pendapatan asli daerah;
- d) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa;
- f) Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Gunung Mas;
- g) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat, keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD serta harus mendukung kepada pencapaian target Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini ditujukan agar tercipta suatu sistem penganggaran yang berbasis perencanaan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	h